

Nama : Adzra Ati'iqah
Npm : 2413031056
Kelas : 2024 B

SOAL

PT Garuda Sejahtera adalah perusahaan publik di Indonesia yang bergerak di bidang penerbangan. Dalam laporan keuangan terbarunya, perusahaan mengakui pesawat-pesawat yang dimiliki berdasarkan **nilai wajar (fair value)** sesuai dengan pendekatan IFRS (International Financial Reporting Standards).

Namun, auditor memberikan catatan bahwa penentuan nilai wajar tersebut tidak mencerminkan kondisi pasar di Indonesia secara akurat, karena pasar aktif untuk pesawat di Indonesia sangat terbatas. Auditor menyarankan agar perusahaan mempertimbangkan penggunaan **biaya historis (historical cost)** yang lebih konservatif.

Sementara itu, PT Garuda Sejahtera menyatakan bahwa pendekatan nilai wajar lebih mencerminkan "**substance over form**" dan **kebutuhan investor global**, karena perusahaan ingin menarik investor asing. Dalam penyusunannya, perusahaan mengacu pada **kerangka konseptual IFRS**, bukan **kerangka konseptual PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)**.

Beberapa anggota dewan komisaris mempertanyakan:

1. Apakah penggunaan kerangka konseptual global (IFRS) sah diterapkan untuk perusahaan di Indonesia?
2. Apakah kerangka konseptual PSAK sudah cukup memadai untuk menjawab dinamika bisnis global?
3. Apakah nilai wajar benar-benar mencerminkan realitas ekonomi yang bisa diandalkan dalam konteks Indonesia?

Pertanyaan:

1. **Kritisi keputusan PT Garuda Sejahtera dalam memilih nilai wajar sebagai dasar pengukuran. Apakah keputusan tersebut dapat dibenarkan secara konseptual dalam konteks Indonesia? Jelaskan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dalam kerangka konseptual PSAK dan IFRS.**
2. **Bandingkan kerangka konseptual PSAK (Indonesia) dan IFRS dalam hal:**
 - Tujuan laporan keuangan
 - Karakteristik kualitatif informasi
 - Basis pengukuran

- Asumsi entitas dan kelangsungan usaha

Apakah Anda setuju bahwa Indonesia sebaiknya mengikuti sepenuhnya kerangka konseptual IFRS tanpa penyesuaian lokal? Jelaskan pendapat Anda dengan argumen kritis, mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan tingkat kematangan pasar di Indonesia.

JAWABAN

1. Keputusan PT Garuda Sejahtera menggunakan nilai wajar (fair value) sebagai dasar pengukuran memiliki kelebihan sekaligus kelemahan bila dikaji dalam konteks Indonesia.

Dari sisi kelebihan (argumen perusahaan):

- Relevansi (PSAK & IFRS): Kerangka konseptual IFRS maupun PSAK menekankan bahwa informasi harus relevan bagi pengambilan keputusan. Fair value dianggap lebih mampu mencerminkan kondisi ekonomi terkini dibandingkan biaya historis. Dalam kasus Garuda, nilai wajar pesawat dapat memberikan gambaran lebih akurat tentang aset perusahaan dan meningkatkan daya tarik bagi investor global.
- Substance over form: Prinsip ini juga sejalan dengan IFRS dan PSAK, yaitu informasi akuntansi sebaiknya menggambarkan realitas ekonomi, bukan hanya bentuk formal pencatatan.

Dari sisi kelemahan (kritik auditor):

- Keterandalan (Faithful Representation): IFRS dan PSAK sama-sama menuntut bahwa informasi harus dapat diandalkan, dapat diverifikasi, dan bebas dari bias material. Masalahnya, di Indonesia pasar aktif untuk pesawat sangat terbatas. Akibatnya, penentuan fair value lebih banyak bergantung pada asumsi dan model penilaian (Level 3 fair value). Hal ini berisiko menurunkan keterandalan informasi.
- Comparability: Jika metode penilaian tidak seragam antar perusahaan, laporan bisa sulit dibandingkan. Ini bertentangan dengan karakteristik kualitatif yang ditekankan oleh PSAK dan IFRS.

Konteks Indonesia:

- PSAK, yang telah banyak dikonvergensi dengan IFRS, sebenarnya membuka ruang penggunaan fair value. Namun, kerangka konseptual juga menegaskan bahwa pemilihan basis pengukuran harus mempertimbangkan keterbatasan pasar, biaya, dan manfaat informasi. Dalam kondisi pasar pesawat yang tidak aktif, penggunaan biaya historis bisa lebih konservatif dan lebih sesuai untuk menjaga keandalan laporan.

Secara konseptual, keputusan PT Garuda Sejahtera dapat dibenarkan bila perusahaan mampu menunjukkan proses valuasi yang transparan, metodologi yang kredibel, serta

pengungkapan memadai atas asumsi yang digunakan. Namun, dalam konteks Indonesia yang pasar pesawatnya tidak aktif, keputusan tersebut patut dikritisi karena berpotensi menurunkan keterandalan informasi. Dengan demikian, perusahaan sebaiknya mempertimbangkan pendekatan hybrid misalnya, tetap mencatat dengan biaya historis namun mengungkapkan informasi nilai wajar dalam catatan tambahan agar relevansi dan reliabilitas sama-sama terpenuhi.

2. Perbandingan IFRS dan PSAK

➤ Tujuan Laporan Keuangan

- 1) **IFRS:** Memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas untuk membantu investor, kreditur, dan pemakai eksternal lainnya dalam pengambilan keputusan ekonomi. Fokus utama decision usefulness
- 2) **PSAK:** Hampir sama, karena PSAK sudah dikonvergensi dengan IFRS. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, namun PSAK menambahkan penekanan pada konteks lokal dan kepatuhan terhadap peraturan di Indonesia.

➤ Karakteristik Kualitatif Informasi

- 1) **IFRS:** Dua karakteristik fundamental: relevance (relevansi) dan faithful representation (penyajian andal). Karakteristik pendukung: comparability, verifiability, timeliness, dan understandability.
- 2) **PSAK:** Sama dengan IFRS, namun dalam praktik di Indonesia istilah “reliabilitas” masih sering dipakai untuk menekankan keterandalan informasi. Intinya, baik IFRS maupun PSAK menekankan kombinasi relevansi dan keterandalan, dengan mempertimbangkan kendala biaya dan manfaat.

➤ Basis Pengukuran (Measurement Bases)

- 1) **IFRS:** Mengakui berbagai basis pengukuran, antara lain historical cost, fair value, current cost, value in use, dan present value. Pemilihan basis harus mempertimbangkan relevansi dan keterandalan dalam konteks tertentu. IFRS cenderung mendorong penggunaan fair value bila data pasar tersedia dan dapat diandalkan.
- 2) **PSAK:** Sudah mengadopsi prinsip serupa, namun penerapan fair value lebih hati-hati karena mempertimbangkan keterbatasan pasar di Indonesia. Historical cost masih lebih banyak digunakan, terutama pada aset yang pasarnya tidak aktif.

➤ Asumsi Entitas dan Kelangsungan Usaha (Going Concern)

- 1) **IFRS:** Mengasumsikan laporan keuangan disusun dengan dasar akrual dan entitas akan melanjutkan kelangsungan usahanya kecuali terbukti sebaliknya. Jika ada ketidakpastian signifikan, harus diungkapkan.

- 2) **PSAK:** Sama dengan IFRS, mengakui asumsi dasar akrual dan going concern. Namun, PSAK biasanya lebih menekankan kepatuhan terhadap ketentuan lokal (misalnya peraturan OJK atau BEI) dalam hal pengungkapan going concern.

Secara umum, PSAK dan IFRS hampir identik karena PSAK adalah hasil konvergensi IFRS. Perbedaan utamanya ada pada penekanan konteks lokal, seperti keterbatasan pasar, kesiapan infrastruktur akuntansi, dan regulasi Indonesia.

Saya tidak sepenuhnya setuju apabila Indonesia langsung mengikuti kerangka konseptual IFRS tanpa penyesuaian lokal. Indonesia sebaiknya tetap mengonvergensi IFRS, namun dengan penyesuaian lokal (endorsement approach). Artinya, prinsip IFRS diadopsi, tetapi penerapannya disesuaikan dengan kondisi pasar, regulasi, dan infrastruktur akuntansi domestik. Pendekatan ini lebih realistis dibandingkan mengadopsi IFRS mentah-mentah, karena menjaga keseimbangan antara relevansi global dan reliabilitas informasi dalam konteks Indonesia.